

Vol. XVI, NO. 1, Januari - Juni 2019

ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Editorial Team:

Editor in-Chief

Islah Gusmian, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mahrus eL-Mawa, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta

Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga

M. Endy Saputro, IAIN Surakarta

Nashruddin Baidan, IAIN Surakarta

Managing Editor

Nur Kafid, IAIN Surakarta

Editor

Subkhani Kusuma Dewi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Yuyun Sunesti, UNS Solo

Editorial Assistant

Nur Rohman, IAIN Surakarta

Siti Fathonah, IAIN Surakarta

Reviewer

M. Faisol Fatawai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abad Badruzzaman, IAIN Tulung Agung

Fadhli Lukman, Universität Freiburg, Germany

Ahmad Fawaid Sjadzili, IAIN Madura

Ahmad Fuad Fanani, University of Toronto, Canada

Jajang A Rohmana, UIN Sunan Gunung Djati

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

Alamat Redaksi:

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

e-mail: jurnal.alaraf@gmail.com

web: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf>

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Tabel of Content

Tafsir Ayat <i>Alabkam</i> Abil Fadhol Alsenory: Sebuah Model Tafsir Analisis Kritis Muhammad Asif, Abdul Wadud Kasyful Humam	1
Alqur'an dan Hadith dalam Wacana Delegitimasi Nasionalisme di Media Online Islam Miski, Ali Hamdan	25
Dinamika Teks dan Konteks: Model Dialektika Alqur'an dan Realitas Supriyanto	47
Alghazali dan Kesuksesannya dalam Menyebarkan Teologi Sunni Asy'ari Alma'arif	65
Model Sinkretisme Islam dan Kejawen: Kajian Historis-Filosofis Atas Serat Sasangka Jati Abdullah Safiq	87
Desain Riset Maqhasid Syari'ah: Upaya Pembaruan dalam Penelitian Muslihun	105
Pesantren dan Program Deradikalisasi Agama Arkanudin Budiyanto, Subejo, Samsul Maarif	121
<i>Author Guideline</i>	137

PESANTREN DAN PROGRAM DERADIKALISASI AGAMA

Arkanudin Budiyo, Subejo, Samsul Maarif

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstrak

Keywords:

*Pesantren,
Deradicalization,
Religion*

Studi ini mencoba mendeskripsikan sikap masyarakat pesantren terhadap program deradikalisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah beserta berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya sikap tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, hasil studi menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Pesantren yang selama ini keberadaannya menyatu dengan masyarakat, dipercaya dan diyakini oleh masyarakat sebagai lembaga yang mampu melakukan perubahan terhadap cara pandang sekaligus model keberagamaan masyarakat. Namun pelibatan pesantren perlu memperhatikan faktor budaya yang ada di lingkungan pesantren. Bingkai budaya inilah yang selanjutnya akan mampu menterjemahkan pola komunikasi deradikalisasi yang tepat, dan keberterimaan yang pas atas program deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah.

Abstract

This study tries to describe responses of the pesantren community on the deradicalization program carried out by the Indonesian government in the Sukoharjo Regency, Central Java along with various factors that influence to those responses. Through the qualitative approach, the results of studies show that pesantren have a strategic role in supporting the success of deradicalization program. Pesantren, which have been united with the community, are trusted and believed by the community as an institution capable of making changes to the outlook as well as the religious model of the community. However, the involvement of pesantren needs to pay attention based on the cultural factors that exist in the pesantren environment. This cultural frame will then be able to

support the appropriate deradicalization communication patterns, and the right acceptance of the government in running the deradicalization program.

Pendahuluan

Setelah Reformasi 1998, seiring dengan menguatnya demokratisasi di Indonesia, tren tindakan radikalisme dan ekstremisme pun cenderung meningkat.¹ Bahkan keberadaannya seolah terus mengalami proses reproduksi dalam berbagai bentuk dan varian.² Melihat fenomena ini, pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan dalam bingkai pembangunan nasional, yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembuktukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Badan inilah yang secara khusus mendapatkan mandat untuk melaksanakan program deradikalisasi.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian sekaligus dijadikan sebagai mitra BNPT dalam pelaksanaan program deradikalisasi adalah Pondok Pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia dianggap memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.³ Pesantren, oleh Clifford Geertz dianggap sudah menjadi bagian dari subkultur masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Pesantren pun telah menunjukkan peran pentingnya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.⁴ Pada zaman penjajahan, pesantren telah mengambil peran strategis sebagai basis perjuangan kaum nasionalis-

¹ Nur Kafid, "Dari Islamisme Ke 'Premanisme': Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokrasi 1," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 57–79, <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4737>.

² Mazayyin Ahyar, "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam," *Walisono* 23, no. 1 (2015): 1–26.

³ Dakir & Umiarso, "Pesantren dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial bagi Kemajuan Masyarakat," *Al-Araf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XIV, no. 1 (2017): 1–22.

⁴ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986).

pribumi.⁵ Sementara pada era pasca kemerdekaan, pesantren tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan (Islam) masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, kaderisasi, dan transformasi sosial masyarakat.⁶ Pesantren hadir untuk melakukan pemetaan terhadap persoalan-persoalan masyarakat, sekaligus memberikan solusi alternatifnya. Termasuk saat ini, ketika bangsa Indonesia menghadapi persoalan radikalisme.⁷

Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT, pada awalnya tidak berjalan optimal, bahkan mendapat banyak penolakan dari beberapa ormas Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)—yang belakangan telah secara resmi dibubarkan oleh pemerintah—, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jama'ah Anshorussunnah (JAS).⁸ Munculnya penolakan tersebut, menurut Leeuwis memerlukan perubahan pengetahuan dan persepsi terhadap sebuah kebijakan,⁹ termasuk menggandeng kelompok strategis di masyarakat yang mampu menjadi mitra kerja dalam kerangka pemberdayaan dan transformasi sosial.¹⁰

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pelaksanaan program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Di wilayah ini, BNPT menggandeng pondok pesantren, selain karena posisi strategisnya, juga disertai pertimbangan beberapa pelaku tindakan terorisme di Indonesia yang dianggap

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2012).

⁶ Marzuki Wahid, "Ma'had Aly: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang," *Istiqro'* (2005).

⁷ Ahmad Saifuddin, "Reproduksi Pemahaman dan Dinamika Psikologis Paham Radikal: Analisis terhadap Sikap 'Menyalahkan' Kelompok Lain," *Al-Araf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 1 (2017): 11.

⁸ Mirza Dwiky Hermastuti, "Respon Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," *Journal of International Relations* 2, no. 1 (2016): 122–130.

⁹ Leeuwis C., *Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

¹⁰ Marzuki Wahid, "Pondok Pesantren dan Penguatan Civil Society," *Jurnal Anla* 22, no. 2 (2001): 19.

memiliki keterkaitan dengan pesantren di wilayah Sukoharjo.¹¹ Tragedi Bom Bali, JW Marriot di Jakarta, yang melibatkan Amrozi CS dianggap memiliki keterkaitan dengan pesantren di wilayah Sukoharjo. Dari sinilah kemudian upaya deradikalisasi di wilayah ini menjadi dilakukan dengan menggandeng pondok pesantren.¹² Lalu bagaimanakah sebenarnya respon pesantren, khususnya yang ada di wilayah kabupaten Sukoharjo, terhadap pelaksanaan program tersebut, dan bagaimanakah kontribusinya dalam proses pencegahan tindakan radikalisme di Indonesia, di sinilah urgensi dari studi ini.

Deradikalisasi diartikan sebagai proses menetralkan ideologi seseorang, mengubahnya dari radikal menjadi tidak radikal, tidak hanya terbatas pada tataran perubahan perilaku.¹³ Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk mengubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok.¹⁴ Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi, seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat di tingkat kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Program deradikalisasi berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Sehingga upaya menanggulangnya pun dilakukan melalui deradikalisasi. Esensinya, mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang.

Deradikalisasi adalah upaya membendung laju radikalisme, yang berorientasi pada tindak kekerasan, peperangan dan teror. Memang

¹¹ Cholid Abdullah, "Tradisi Pesantren sebagai Pusat Peradaban Muslim Nusantara," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XI, no. 2 (2014): 17–37, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1188>.

¹² Rohmat Suprpto, *Laporan Penelitian; Persepsi Santri Ponpes di Sukoharjo terhadap Jihad dan Terorisme* (Sukoharjo, 2014).

¹³ Boucek Rabasa, Pettyjohn, Ghez, *Deradicalizing Islamist Extremists* (Santa Monica: RAND Corporation, 2010).

¹⁴ Farid Septian, "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010).

ada beberapa istilah yang kemudian terkait dengan istilah radikalisme,¹⁵ seperti Islamisme, fundamentalisme dan revivalisme. Bahkan ada pula yang menggunakan istilah salafisme, wahabisme dan gerakan Islam Transnasional.¹⁶ Meski dalam penggunaan berbagai istilah tersebut tidak lepas dari berbagai perdebatan, tetapi unsur yang dianggap memiliki keterkaitan dengan radikalisme adalah adanya unsur tindakan yang mengarah pada kekerasan.

Pelaksanaan program deradikalisasi yang dilakukan oleh setiap negara di dunia ini memang memiliki perbedaan. Tetapi di dalam perbedaan tersebut, ada kesamaan karakteristik yang dimiliki, sebagaimana dinyatakan oleh *Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*; yaitu pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum, program khusus di dalam penjara, pendidikan, pelatihan, pengembangan dialog lintas budaya, pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi, kerja sama global, pengawasan *cyber terrorism*, perbaikan perangkat perundang-undangan, rehabilitasi, pengembangan dan penyebaran informasi, serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁷

Pesantren, sebagai salah satu subkultur masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah, oleh pemerintah dilibatkan sebagai mitra strategis dalam program deradikalisasi. Pesantren memiliki karakter khas dalam melakukan perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Sikap Masyarakat Pesantren

Program deradikalisasi memfokuskan kegiatannya pada tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman

¹⁵ Farid Septian, "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang."

¹⁶ Mohammad Zaenal Arifin, "Deradikalisasi Penafsiran Alqur'an," *Empirisma* 24, no. 1 (2015).

¹⁷ Counter-Terrorism Implementation Task Force, *First Reprint of the Working Group Redicalisation and Extremism that Lead to Terorrism*, 2008.

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995).

keagamaan dan kebangsaan para pelaku tindak pidana terorisme, keluarga, jaringan dan orang/kelompok dan/atau lembaga yang berpotensi terpapar, melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan. Sikap masyarakat, tentu beragam. Karena hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman mereka atas program tersebut. Secara umum, sikap ini dapat dikategorikan menjadi tiga (3) macam, yaitu yang dicerminkan secara afektif (suka atau tidak suka), kognitif (pengetahuan) dan konatif (perilaku). Tetapi dalam studi ini, sikap tersebut dikategorikan menjadi, sikap toleran, moderat dan inklusif.

Pertama, sikap toleran. Sikap ini ditunjukkan melalui kesediaan untuk menghormati kelompok lain, mau menerima perbedaan dan tidak diskriminatif kepada kelompok atau penganut agama lain. Jika dilihat dari kategori sikap ini, masyarakat pesantren terlihat sangat toleran kepada kelompok dan pemeluk agama lain. Pandangan mereka menyatakan bahwa tidak mau tindakan diskriminatif itu terjadi pada siapapun. Seperti halnya yang dinyatakan oleh M Naufal, salah satu santri senior: “Saya menolak tindakan diskriminatif terhadap siapapun karena bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai kemanusiaan. Seringkali dalam pembinaan yang dilakukan oleh kepolisian ditekankan apabila tidak bersaudara seiman, maka ia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Maka kita harus saling membantu. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi santri, sehingga bisa berlatih untuk saling membantu, minimal dimulai dari adik kelas”¹⁹

Kedua, sikap inklusif. Sikap ini terlihat dari cara pandang mereka dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial-kemasyarakatan. Mereka yang memiliki sikap ini terlihat dari kesediaannya untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan kelompok lain. Mereka yang dikategorikan memiliki sikap ini cenderung lebih terbuka dan tidak sektarian. Misalnya dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masyarakat sekitar pesantren, maupun kesediaan mereka mengikuti program deradikaliasi

¹⁹ Wawancara dengan M. Naufal, salah satu santri pesantren Sukoharjo pada tanggal 24 Nopember 2018 jam 20.15 WIB

yang dilakukan pemerintah. Bagi mereka yang masuk dalam kategori ini memiliki pandangan keberagaman yang sangat toleran, tetapi di saat bersamaan juga meyakini dan menjalankan perintah agamanya dengan sungguh-sungguh.

Ketiga, sikap moderat. Masyarakat pesantren yang memiliki sikap ini ditunjukkan melalui pandangan mereka yang cenderung memilih bersikap netral dalam menyikapi adanya perbedaan. Mereka cenderung mendahulukan sikap kooperatif dan kerjasama dibanding harus menempuh cara-cara kekerasan. Kehidupan masyarakat dan negara yang harmonis, menjadi bagian yang diharapkan oleh kelompok ini. Isu ini menjadi salah satu konten dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam materi wawasan kebangsaan.

Kegita jenis sikap di atas, jika ditelisik lebih dalam juga menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat pesantren setuju terhadap program deradikalisasi agama yang dilakukan pemerintah yang menjadikan pesantren sebagai mitra kerja. Meskipun masih ada beberapa orang yang memberikan catatan, meski program tersebut dapat diterima oleh masyarakat pesantren, tetapi pemerintah dalam hal ini BNPT tetap harus terus melakukan proses evaluasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi di masa mendatang. Mengingat, bahwa perubahan tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat sementara kondisi kehidupan sosial masyarakat, termasuk pesantren juga terus berubah. Sehingga pola komunikasi dan pendekatan pun perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik, lebih memahami konteks sosial-budaya di mana pesantren itu berada. Termasuk latar belakang para santri yang ada di pondok pesantren.

Dengan demikian, munculnya sikap tersebut di atas, tentu harus pula dilihat berbagai faktor melatarbelakanginya. Artinya, keberhasilan di satu tempat, atau respon baik di satu tempat, belum tentu dapat diterapkan di tempat yang lain. Seperti yang dinyatakan oleh Festinger dalam teori

disonansi kognitifnya (*the cognitive dissonance theory*),²⁰ bahwa sikap dan tindakan individu dalam satu komunitas itu memiliki konsistensi antara satu dengan yang lain. Sehingga faktor-faktor tertentu harus diperhatikan jika seseorang hendak melakukan perubahan sikap dan perilaku seseorang. Beberapa faktor yang dimaksud adalah (1) kekuatan, berupa peraturan-peraturan, kekuatan fisik dan kekuatan ekonomi; (2) perubahan norma kelompok, bila seseorang telah menginternalisasi norma kelompok, maka norma itulah yang akan dijadikan sebagai norma pribadi dalam pembentukan sikapnya; (3) perubahan *group membership*; (4) perubahan *group reference*; dan (5) pembentukan kelompok baru. Perubahan tersebut dapat terjadi, menurut Azwar,²¹ disebabkan oleh karena adanya pengalaman pribadi, orang lain yang dianggap penting dalam hidup seseorang itu (*leadership*), budaya, media massa, lembaga pendidikan, agama, dan prasangka. Dalam kasus masyarakat pesantren, faktor paling dominan yang mempengaruhi perubahan sikap mereka adalah terhadap program deradikalisasi adalah *leadership* dan budaya.

Namun demikian, faktor yang mempengaruhi perubahan sikap masyarakat pesantren terkait program deradikalisasi ini, secara umum dapat dikategorikan menjadi dua (2), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

Faktor internal yang turut mempengaruhi sikap warga pesantren terhadap program deradikalisasi ini antara lain; *pertama*, pengalaman pribadi individu (santi dan/atau warga pesantren lainnya). Apa yang telah dan sedang dialami oleh si individu tersebut akan turut serta mempengaruhi dan membentuk sikap dan penghayatan upaya deradikalisasi. Pengalaman pribadi diukur melalui pemahaman pribadi yang bersangkutan terhadap apa itu radikalisme, deradikalisasi dan partisipasi mereka dalam kegiatan

²⁰ Festinger, *Comparative Social Psychology Theory* (Jakarta: Gramedia, 2001).

²¹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

radikalisme dan deradikalisasi. Dengan kata lain, intensitas keikutsertaan seseorang dalam kegiatan radikalisme dan/atau deradikalisasi akan turut menentukan sikapnya terhadap program tersebut. Artinya mereka yang cukup intens mengikuti kegiatan deradikalisasi dalam skala tertentu akan lebih besar peluangnya untuk menerima, dibandingkan dengan mereka yang belum pernah atau baru sekali mengikuti program tersebut.

Kedua, prasangka. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi, sebagai bentuk penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sehingga munculnya adalah ego pribadi. Jika warga pesantren memiliki prasangka yang positif, atau jika program deradikalisasi ini dapat dianggap akan memberikan dampak positif kepada warga pesantren, maka program ini tentu akan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi. Pasalnya, prasangka inilah yang pada tahap selanjutnya menjadi pintu masuk dalam menanamkan pemahaman kepada mereka mengenai tujuan dan pentingnya program deradikalisasi. Dengan demikian, pola komunikasi dan pendekatan dalam mengkomunikasikan pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan program itu sendiri.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang keberadaan penyebabnya ada di luar atau dari luar si individu. *Pertama*, budaya. Kebudayaan di mana seseorang itu hidup akan memiliki pengaruh besar terhadap terbentuk sikap seseorang. Jika seseorang itu hidup dalam budaya yang mempunyai norma yang mendukung upaya deradikalisasi, maka akan terbuka peluang dan kemungkinan bagi seseorang itu untuk bersikap mendukung upaya tersebut. Sebaliknya, jika seseorang itu hidup dalam budaya yang longgar atau bahkan cenderung mendukung tindakan yang mengarah pada radikalisme tentu akan memunculkan sikap penolakan terhadap upaya

deradikalisasi. Di sinilah diperlukan adanya pemetaan yang tepat oleh para pemangku kebijakan mengenai dimensi budaya sebagai bagian dari strategi deradikalisasi. Pesantren, sebagai komunitas dengan beragam latar belakang anggotanya, tentu memiliki tingkat heterogenitas budaya yang tinggi. Pasalnya, perbedaan pandangan dan paham sudah ada sejak warga pesantren itu ada.

Di dalam institusi pesantren sendiri telah jelas, menunjukkan adanya aturan dan norma yang terkait dengan bagaimana menyikapi adanya perbedaan itu. Modal keragaman yang telah diterima dan dimiliki oleh warga pesantren, dapat menjadi media sekaligus modal bagi keberhasilan program deradikalisasi. Sebagaimana diakui oleh Rajendra, salah satu pengurus organisasi pelajar yang ada di pesantren:

“Penanaman nilai-nilai dilakukan secara berulang-ulang oleh ustadz dan ustadzah dalam setiap kesempatan, sampai terkadang kami bosan. Dan menjadi salah satu materi wajib pada saat pengarahan di tahun pelajaran baru. Ada lima nilai berupa prinsip-prinsip, yaitu bersumber dari Alqur’an dan Sunnah, *rahmatan lil ‘alamin*, misi perdamaian, modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan berdiri di atas semua golongan.”²²

Kedua, leadership. Orang lain di sekitar seseorang itu tinggal dapat menjadi satu komponen yang ikut mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap sesuatu. Orang lain yang dimaksud ini, dapat berarti orang yang dianggap penting dalam kehidupannya, orang yang diharapkan persetujuan bagi setiap pandangan hidup, gerak tingkah-laku, atau orang yang memiliki posisi khusus (*significant others*) dalam hidup. Misalnya, orang lain itu adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, isteri atau suami dan lain-lain.

Untuk posisi *significant others*, di dalam komunitas masyarakat pesantren biasanya adalah kiai atau pimpinan pondok pesantren. Kepemimpinan, pola pikir, dan pandangan serta perilaku kiai menjadi

²² Wawancara pribadi dengan Rajendra, salah satu santri pesantren di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Nopember 2018 jam 16.00 WIB

bagian terpenting di dalam Pesantren, termasuk dalam membentuk sikap dan pandangan warga pesantren. Sosok kiai menjadi ciri khas atau simbol dari pesantren itu sendiri. Dengan kata lain, pola komunikasi pelaksana program deradikalisasi dengan pimpinan pesantren, menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau tidak capaian kegiatan itu.²³ Model deradikalisasi inilah yang diterapkan di wilayah Kabupten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kiai menjadi media penting yang mengkomunikasikan mengenai gerakan radikalisme dan kegiatan deradikalisasi yang berjalan.

Namun demikian, model komunikasi tidak hanya cukup pada level pimpinan pesantren saja. Model komunikasi langsung dengan warga pesantren pun sangat diperlukan, agar program deradikalisasi dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, pola komunikasi yang tepat dan jelas, akan sangat menentukan sikap keberterimaan warga. Kejelasan arah program mempermudah subjek sasaran program dalam menerima perubahan. Model komunikasi inilah yang masih menjadi kendala belum optimalnya program deradikalisasi yang dilakukan. Meski pada level tertentu, pola dan kejelasan program dapat dipahami, tetapi ada bagian tertentu pula dari warga pesantren yang masih belum sepenuhnya memahami deradikalisasi. Teman sebaya dan guru pendamping misalnya, jika ini perannya dapat dioptimalkan, tentu gerakan deradikalisasi akan lebih dapat berjalan secara optimal.

Ketiga, kurikulum pendidikan agama. Faktor ini penting juga untuk diperhatikan dalam upaya deradikalisasi. Melalui kurikulum pendidikan agama, proses deradikalisasi akan lebih cepat diterima oleh para santri. Melalui kurikulum inilah akan diletakkan dasar pengertian dasar dan konsep moral dalam diri individu. Dengan kata lain, jika pesantren menerapkan kurikulum yang mengarah pada tindak deradikalisasi, maka sudah tentu proses deradikalisasi akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Sebaliknya, jika pesantren menerapkan kurikulum agama yang

²³ Stephen W & Karen A. Foss Littlejohn, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014).

cenderung fanatis, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program deradikalisasi.

Namun demikian, memang secara umum pola dan pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui BNPT yang melibatkan pesantren sebagai mitra kerjanya dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Meskipun masih ada beberapa pola yang harus diperbaiki, tentu dengan kembali mengkaji faktor-faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku seseorang. Termasuk dalam menerima maupun menolak sebuah pandangan baru terkait pemahaman terhadap ajaran agama. Jika ditelisik lebih serius, dari faktor internal dan eksternal tersebut di atas, faktor eksternal menjadi hal yang dominan pengaruhnya dibandingkan dengan faktor eksternal di dalam mempengaruhi sikap penerimaan warga pesantren terhadap program deradikalisasi yang dilakukan.

Faktor internal, dalam hal ini pengalaman pribadi dan prasangka individu yang dilakukan melalui interkasi dan keikutsertaan dalam program deradikalisasi ternyata belum mampu merubah sikap penerimaan masyarakat pesantren terhadap program deradikalisasi. Program yang terkesan sangat formal justru menjadikan orang yang ikut serta dan hadir dalam kegiatan tersebut hanya berupaya untuk memenuhi persyaratan formal juga. Karena kehadiran mereka pun hanya sekedar memenuhi undangan atau perintah. Belum sampai pada level kesadaran bahwa program tersebut sebagai sebuah kebutuhan.

Sebaliknya, justru faktor eksternal lah yang dianggap menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi sikap masyarakat. Kebudayaan, di mana seseorang itu hidup dan dibesarkan memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan sikap²⁴ dan perilaku²⁵ seseorang. Dengan kata lain, jika pelaksanaan program deradikalisasi hendak mendapatkan sikap

²⁴ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*.

keberterimaan yang positif dari masyarakat pesantren, maka pertimbangan budaya dan lingkungan di mana pesantren itu berada harus menjadi bagian dari upaya implementasi program tersebut. Bukan sebaliknya justru menawarkan sesuatu yang sama sekali baru dari kultur yang sudah ada.

Penutup

Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPT dengan menggandeng pesantren sebagai mitra langsung, terutama yang dilakukan di wilayah kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, memang menunjukkan adanya keberterimaan yang positif dari masyarakat pesantren. Tetapi hal ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama bagi beberapa kelompok kecil yang masih belum sepenuhnya merespon dengan sikap positif atas pelaksanaan program tersebut. Beberapa catatan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah mengenai program ini. Dimensi kebudayaan perlu mendapat perhatian khusus dari para pengambilan kebijakan program deradikalisasi ini.

Dimensi budaya ini perlu menjadi bagian penting, dalam rangka menyusun strategi komunikasi yang lebih baik, agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Selain itu kultur *leadership* juga perlu diperkuat dalam tradisi pesantren. Hal ini untuk lebih memudahkan, tentu BNPT juga harus melibatkan mitra lembaga pemerintah lain, yang lebih memahami kultur pesantren, yaitu Kementerian Agama. Kementerian inilah yang secara kultur memiliki kedekatan dengan kultur pondok pesantren di Indonesia secara umum. Kedekatan inilah yang tentu akan lebih memudahkan proses komunikasi yang lebih baik bagi pesantren. Sehingga tidak muncul *prejudice* yang negatif dari masyarakat pesantren terhadap program deradikalisasi.

Referensi

- Abdullah, Cholid. “Tradisi Pesantren sebagai Pusat Peradaban Muslim Nusantara.” *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XI, no. 2 (2014): 17–37. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1188>.
- Ahyar, Mazayyin. “Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam.” *Walisongo* 23, no. 1 (2015): 1–26.
- Akhmadi, Yudono Yanuar. “Menteri Agama: Jangan Merasa Paling Benar dalam Beragama.” *Nasional.Tempo.Co*, 2017.
- Arifin, Mohammad Zaenal. “Deradikalisasi Penafsiran Alqur’an.” *Empirisma* 24, no. 1 (2015).
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Bilqis Rihadatul Aisy, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, Monique Anastasia Tindage. “Penegakan Kontra Radikalisasi melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme.” *Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 1.
- C., Leeuwis. *Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Festinger. *Comparative Social Psychology Theory*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Force, Counter-Terrorism Implementation Task. *First Reprot of the Working Group Redicalisation and Extremism That Lead to Terrorrism*, 2008.
- Geertz, Clifford. *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Kultural Broker, in Comparative Studies in Society and History*. Cambridge, 1960.
- Hermastuti, Mirza Dwiky. “Respon Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).” *Journal of International Relations* 2, no. 1 (2016): 122–130.
- Kafid, N. “Dari Islamisme ke ‘Premanisme’: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokrasi 1.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 57–79. <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4737>.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba

- Humanika, 2014.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rabasa, Pettyjohn, Ghez, Boucek. *Deradicalizing Islamist Extremists*. Santa Monica: RAND Corporation, 2010.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Saifuddin, Ahmad. "Reproduksi Pemahaman dan Dinamika Psikologis Paham Radikal : Analisis terhadap Sikap 'Menyalahkan' Kelompok Lain." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 1 (2017): 11.
- Septian, Farid. "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010).
- Suprpto, Rohmat. *Laporan Penelitian Persepsi Santri Ponpes di Sukoharjo terhadap Jihad dan Terorisme*. Sukoharjo, 2014.
- Thomas. *Sociology of Religion*. Edited by Penerjemah. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Umiarso, Dakir &. "Pesantren dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial bagi Kemajuan Masyarakat." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XIV, no. 1 (2017): 1–22.
- Wahid, Marzuki. "Ma'had Aly: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang." *Istiqro'* (2005).
- . "Pondok Pesantren dan Penguatan Civil Society." *Jurnal Anla* 22, no. 2 (2001): 19.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1986.

